

Pramono: Silakan KPK Usut

■ Proyek IT DPR Rp 9,4 M

JAKARTA, TRIBUN - Anggaran dana pengadaan jaringan informasi teknologi (IT) di gedung DPR senilai Rp 9,4 miliar dinilai sangat fantastis. Wakil Ketua DPR Pramono Anung, terheran-heran atas besarnya nilai ini. Ia menyatakan akan mengundang KPK untuk mengusut apakah proyek IT tersebut ada dugaan penggelembungan atau mark-up.

"Kami belum tahu angka Rp 9 miliar itu. Itu fantastik, dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa," ujar Pramono di gedung DPR, Rabu (11/5).

Pramono mengaku sudah mengecek dan berjanji membuka apa adanya hasil temuan yang dia peroleh. "Tapi saya nggak bisa bilang ada dugaan korupsi di dalam situ," jelas Pramono.

Adanya kasus pengadaan IT tersebut, lanjut Pramono, hendaknya dijadikan pelajaran untuk Sekjen DPR memperbaiki diri. "Perhatian masyarakat ini harus jadi momentum untuk memperbaiki diri," tandasnya.

Informasi ini terkuak atas desakan anggota Komisi I DPR Roy Suryo kepada Sekjen DPR untuk membuka data-data mengenai pengadaan sistem IT di DPR. Proyek bernilai Rp 9,4 Miliar tersebut dianggap gagal.

Awalnya proyek IT tersebut digagas pada 2009. Dalam proyek, akses internet bisa dipergunakan dengan memakai gadget, laptop dan alat lainnya di dalam maupun di luar gedung DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Bidang Komunikasi, Informatika Roy Suryo bertekad membongkar dugaan permainan dalam proyek IT di DPR. Ia menilai, proyek tersebut sudah



NET Wakil Ketua DPR

“ Kami belum tahu angka Rp 9 miliar itu. Itu fantastik dan kalau menimbulkan kecurigaan, pimpinan tak akan segan-segan mengundang KPK untuk memeriksa. ”

PRAMONO ANUNG

keterlaluan, karena terkesan sangat mewah.

Menurutnya, sehubungan dengan data harga proyek IT berupa pengadaan fasilitas internet dengan *website dpr.go.id* menelan anggaran antara sembilan hingga Rp 10 miliar lebih.

"Sudah begitu, kurang disosialisasikan ke kita dan fungsinya tak pergunakan maksimal," katanya lagi.

Roy Suryo berulang mengungkapkan, perangkat IT di DPR RI benar-benar menun-

jukkan kesan mewah. Tapi ia mempertanyakan, apakah fasilitas canggih nan mewah itu memang sudah diukur tingkat kegunaannya, apalagi dengan nilai proyek begitu besar.

Ia lalu mengajak publik untuk ikut membongkar ketidakberesan proyek IT ini, karena menggunakan anggaran tidak kecil. Ia juga mengaku memiliki banyak data mengenai hal ini. "Sumonggo (silakan-RED) kalau mau dibongkar," kata Roy Suryo.

Menanggapi kegeraman

anggota DPR, Sekretariat Jenderal DPR mengaku siap apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk untuk mengusut pengadaan IT gedung DPR.

"Kalau KPK masuk silakan. KPK masuk bisa tanpa diminta," ujar Deputy Bidang Pengawasan Anggaran Sekjen DPR Winantuning Tyastiti saat jumpa pers di gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, kemarin.

Menurut Winantuning, selama ini lembaga negara yang rutin memeriksa keuangan kesekretariatan jenderal DPR adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Perbankan (BPKP). "Kalau soal pemeriksaan rutin itu BPKP dan BPK," jelasnya.

Di bagian lain, Winantuning menegaskan, pihak Kesetjenan telah menyosialisasikan alamat email resmi DPR. (tribun-news/wil/ant)